BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Baridwan (2004) dalam penelitian Erawati & Abdulhadi (2018) pada laporan keuangan daerah, pemerintah daerah adalah pelaku utama dalam penyajian laporan keuangan. Ketika laporan keuangan hendak dipublikasikan kepada masyarakat maka harus bersifat terbuka, transparan, akuntabel, serta terdapat kebenaran yang valid sehingga seluruh pihak yang mempunyai kepentingan terhadap laporan keuangan itu dapat memahami dengan baik. Maka dari itu dibutuhkan sebuah informasi laporan keuangan yang memiliki sifat relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, sehingga informasi yang dibutuhkan pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan dapat terpenuhi, dan hal itu bisa membuat otonomi daerah yang tepat serta akurat.

Menurut Diana (2014) dalam penelitian (Yanti, 2020) penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk mendapatkan sebuah informasi dari laporan keuangan pemerintah daerah perlu adanya sebuah sistem yang mengelola data menjadi sebuah informasi yang berharga yang dituntut untuk menghasilkan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Sistem pengendalian intern juga sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern diperlukan agar proses pada pengelolaan anggaran daerah dapat berjalan dengan baik sesuai

dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji, masih banyak fenomena laporan keuangan pemerintah daerah yang belum menyajikan laporan keuangan yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan, dan masih banyak lagi permasalahan dan penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh BPK dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah daerah, seperti yang terjadi pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2022 memuat ringkasan dari 771 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 682 LHP Keuangan (yang mengungkapkan opini BPK yaitu mengungkapkan kewajaran atas laporan keuangan), 41 LHP Kinerja (merupakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan aspek efektivitas), dan 48 LHP Dengan Tujuan Tertentu atau DTT (yang merupakan pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif). Berdasarkan pemeriksaan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap 9.158 temuan yang memuat 15.674 permasalahan sebesar Rp18.37 triliun. Sebanyak 8.116 (51,8%) permasalahan merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp17.33 triliun, yang terdiri atas ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebanyak 5.465 permasalahan, dan juga ketidakpatuhan berupa penyimpangan administrasi

sebanyak 2.651 permasalahan. Kemudian sebanyak 7.020 (44,8%) permasalahan berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), dan sebanyak 538 (3,4%) terkait ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp1,04 triliun (www.bpk.go.id)

Kualitas laporan keuangan bisa dinilai dari opini BPK. Terdapat beberapa tingkatan dalam menilai laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dijalankan oleh BPK. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ialah suatu tingkatan tertinggi dalam penilaian audit yang dilaksanakan oleh BPK. Opini WTP merupakan opini yang menjelaskan bahwa dalam laporan keuangan, materi yang akan dilakukan pemeriksaan akan disuguhkan dengan wajar pada semua hal yang material, hasil usaha, posisi keuangan, dan arus kas entitas tertentu yang cocok dengan prinsip akuntansi yang ada di Indonesia pada umumnya (Erawati & Abdulhadi, 2018). Selain itu, kualitas laporan keuangan bisa dilihat dari penyusunannya, yaitu sudah dilakukan penyusunan yang sama seperti pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kemudian sesuai dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, kemudian tidak ada penyimpangan pada peraturan perundang-undangan pada informasi keuangan. Pada tahap selanjutnya laporan keuangan harus ditampilkan tepat waktu seperti yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan.

Sistem akuntansi keuangan daerah diperlukan ketika hendak mewujudkan pelaporan keuangan pada pemerintahan daerah yang akurat. Ketika menyusun laporan keuangan diharuskan berpedoman pada standar yang sudah ditetapkan, yang mana agar bisa mendapatkan laporan keuangan daerah

maka dibutuhkan sebuah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah guna mengelola informasi akuntansi. Berdasarkan Pemendagri Nomer 21 Tahun 2011 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur yang dimulai dari proses mengumpulkan data, pencatatan, pengihtisaran, hingga pelaporan keuangan sebagai wujud mempertanggung jawabkan pelaksanaan APBN yang bisa dijalankan dengan cara menggunakan aplikasi komputer (Erawati & Abdulhadi, 2018).

Kualitas laporan keuangan juga tidak hanya dipengaruhi oleh diterapkannya sistem akuntansi keuangan daerah saja. Kualitas laporan keuangan juga dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Menurut Winindyaningrum & Rahmawati (2009) dalam penelitian (Lestari & Dewi 2020) Semakin baik sistem pengendalian intern yang dimiliki maka akan semakin tinggi juga kualitas laporan keuangan yang didapatkan, karena sistem pengendalian intern yang lemah bisa mengakibatkan sulitnya mendeteksi ketidakakuratan atau kecurangan dalam proses akuntansi, maka bukti audit yang didapatkan dari data akuntansi akan tidak kompeten.

Selain dipengaruhi oleh sistem akuntansi keuangan daerah & sistem pengendalian intern, kualitas dari laporan keuangan juga dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia, karena sumber daya manusia yang berkompoten dibidangnya sangat dibutuhkan ketika menerapkan sistem-sistem ini. Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan seorang pegawai atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau

kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Zubaidi, 2019). Berdasarkan apa sudah dijelaskan, dapat disimpulkan apabila sumber daya manusia tidak kompeten, maka dalam menerapkan sistem-sistem ini akan menjadi tidak maksimal dan juga tidak akan efektif. Selain itu, sumber daya manusia yang tidak kompeten akan rentan menghasilkan kesalahan pada laporan keuangan sehingga dapat menurunkan kualitas laporan keuangan.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu, penelitian pertama yang dilakukan oleh Erawati, & Abdulhadi, (2018), hasil penelitian membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan kepada kualitas laporan keuangan. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Binawati & Nindyaningsih (2022) hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Subetti, et al (2020) hasil penelitian membuktikan bahwa variabel sistem informasi akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Erawati, T., & Abdulhadi, M. F. (2018). Pada penelitian ini terdapat perbedaan, peneliti memodifikasi

variabel dan melakukan penelitian pada objek yang berbeda yaitu pemerintah daerah kabupaten Subang. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Subang dikarenakan terdapat permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh BPK. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2022 yang mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2021, BPK menemukan bahwa perjanjian kerja sama bagi keuntungan atas pengelolaan objek wisata Sari Ater belum mengatur batas waktu penyeteroran bagi keuntungan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. (www.jabarpress.com). Berdasarkan pada apa yang sudah dijelaskan, peneliti memiliki ketertarikan untuk mengangkat penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
2. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Subang.
2. Untuk menjelaskan pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Subang.
3. Untuk menjelaskan pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Subang.

1.4 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis mempertimbangkan keterbatasan agar pembahasan ini dapat lebih terfokus dan mendalam dari segi teoritis maupun segi teknis. Adapun batasan pada penelitian ini ialah seperti di bawah ini:

1. Penelitian ini berfokus pada variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia yang dapat berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada pegawai SKPD Kabupaten Subang yang bekerja sebagai kepala dinas dan bendahara.
3. Pegawai SKPD Kabupaten Subang yang masih aktif masa jabatannya.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharap mampu memberikan informasi dan menambah pengetahuan, serta pemahaman tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Subang, dan juga dapat menjadi referensi untuk dikembangkan di penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Untuk penulis, penelitian ini diharap bisa memberikan gambaran mengenai pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Subang.
2. Untuk mahasiswa, penelitian ini diharap bisa menjadi referensi dan literatur bagi penelitian selanjutnya.